

Daftar Pustaka

Buku – Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta
- Abdul R. Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Edisi Kelima, Kencana, Jakarta
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi 2. Sinar Grafika, Jakarta
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- C.S.T Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Djasman, Muktar. 2009. *Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli*, Surabaya: Mitra Ilmu Surabaya
- Frieda Husni Hasbullah. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata; Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan (jilid 2)*. Indo Hill-Co, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hermansyah. 2003. *Hukum Perbankan Indonesia (Cetakan Kedua)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- IGM. Nurdjana. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Indra Rahmatullah. 2015 *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta.
- Irsan Nawawi. 2007. *Penyitaan dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Pustaka Ilmu, Jakarta

- Irwansyah. 2020. *Penulisan Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Mirra Buana Media, Yogyakarta
- J. Satrio. 2002. *Hak Jaminan Kebendaan*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- King Faisal Sulaiman. 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Thafa Media, Yogyakarta.
- M. Khoidin. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Laksbang Yustisia, Surabaya.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta
- Maria S. W. Sumardjono. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penulisan: Sebuah Paduan Dasar*. Gramedia, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 1984. *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung
- Muhammad Darmaji. 2006. *Jaminan-jaminan Dalam Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurfaidah Said. 2010. *Hukum Jaminan Fidusia Kajian Yuridis dan Filosofis UU No. 42 Tahun 1999*. Kretakupa Print, Makassar
- Oey Hoey Tiong. 1983. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaram Kerangka Berpikir*. Reflika Aditama, Bandung.

Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan. 2011. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*. Cetakan Kelima. Liberty Offset, Yogyakarta.

Subekti. 1989. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta.

_____. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*. Bina Cipta Pers, Jakarta.

_____. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta

Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Garudhawaca, Yogyakarta.

Tan Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. H Terbitan.

Undang - Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Burgerlijk Wetboek (BW);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Hubungan Hukum Antara Pengadilan Perdata Dan Pengadilan Pidana;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.06/2022 Tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Artikel/Jurnal

Direktorat Hukum, *Kajian Hukum: Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Cetakan Pertama, Jakarta.

Fence M Wantu, R Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13

I Made Sarjana, Desak Putu Dewi Kasih, dan I Gusti Ayu Kartika, *Menguji Asas Droit De Suit Dalam Jaminan Fidusia*, Artikel dalam Udayana

Master Law Journal Volume. 4 Nomor 3 September. Magister Hukum Udayana, Denpasar. 2015

Musfiratul Ilmi, Syamsuddin Muchtar, Amir Ilyas, *Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal USM Law Review, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2022

Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, Jurnal Republika, diakses pada 30 Desember 2023

Radhika Bagas Prabowo. *Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Atas Nama Pasangan Dalam Perkawinan Sebagai Pemberi Fidusia Oleh Pasangan Lainnya*. Indonesia Notary. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 3. 2001

Rasyid Yuliansyah. *Perlindungan Hukum Terhadap Penerimaan Fidusia Ketika Benda Yang Diterimanya Sebagai Jaminan Piutang Dirampas Untuk Negara Karena Telah Digunakan Sebagai Sarana Tindak Pidana Kejahatan*. 2019

Soenarto Soerodibroto. *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Edisi 4. Jakarta. Rajawali Pers.

Sandy Wuwungan. *Pertanggungjawaban Polisi Terhadap Barang Bukti Hasil Sitaan*. Lex Crime. Volume IV Nomor 5. Media Neliti. 2015

Sri Soedewi Masjchon Sofwan. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 1977

United Nations. *United Nations Convention Against Corruption* 2003. diterjemahkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime*. Jakarta: UNODC, 2009

Skripsi/Tesis

Joelman Subadi. *Pengelolaan Barang Sitaan Negara Oleh RUPBASAN*. Tesis pada Universitas Indonesia, Jakarta. 2011

Tri Wahyuni. *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUBASAN)* Surakarta. Skripsi pada Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2008

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Bapak Muhammad Ali Akbar, S.H.,M.H



Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Muhammad Khalid Ali,
S.H.,M.H



Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Bapak H. Syahbuddin, S.H



Kanit Tipidter Polres Palopo, Bapak Iptu Ridwan Parintak, S.H



Kanit Tipidter Polres Gowa Bapak Ipda Irham, S.H.,M.H.,M.M



Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Palopo Ibu Erlisa Said, S.H